

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu pembiayaan nasional yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran guna mensejahterakan masyarakat baik dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.² Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan cara melakukan pembangunan nasional. Demi mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus memperhatikan dana ataupun anggaran yang sudah ada agar nantinya proses pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan adanya proses pembangunan nasional yang memerlukan banyak biaya, maka penerimaan negara perlu ditingkatkan.³

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Dalam meningkatkan pembangunan nasional peran yang sangat penting ialah pendanaan. Salah satu upaya yang dapat mewujudkan target pembangunan nasional yaitu mendapatkan banyak dana dengan cara memaksimalkan

² Anita Rizky Widyanti dan Endang Dwi Retnani, “Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” dalam <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id>, diakses 9 September 2024

³ Siti Alifah, *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Warga Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung*, (Tulungagung: Skripsi tidak Diterbitkan, 2024), Hlm. 2

pendapatan pajak.⁴ Pembangunan nasional dapat berhasil apabila dalam kegiatannya melibatkan partisipasi seluruh masyarakat di sebuah negara. Pajak harus dipungut tanpa membebani masyarakat dan juga harus adil dalam pelaksanaan dan pemungutannya.⁵

Dalam penyelenggaraan kegiatan di pemerintahan daerah, pemerintah daerah membutuhkan dana yang memadai agar segala fasilitas dapat terpenuhi. Salah satu sumber dana bagi pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Parwati and Furqon dalam penelitiannya, sumber pendapatan daerah didapatkan dari pembayaran pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak restoran dan hotel, pajak reklame, dan pajak hiburan. Menurut (Hadi, 2018) Pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi yang cukup besar sebagai pendapatan asli daerah, yang setiap tahunnya mengalami peningkatan pemakaian. Pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin.⁶

Menurut pasal 1 ayat 12 dan 13 UU 28/2009 mengenai PKB, PKB yaitu pajak yang terkait dengan kepemilikan kendaraan serta pemungutannya dilaksanakan di KB Samsat. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan melalui *self assesment system*, sistem ini membuat para wajib pajak untuk menghitung hingga melakukan pelaporan mandiri berdasarkan pajak yang

⁴ Balqis Febriani dan Susan Andriana, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor" dalam <https://ejurnal.polnep.ac.id/index.php/japri>, diakses 9 September 2024

⁵ Siti Alifah, *Pengaruh Pengetahuan Pajak...* Hlm. 2

⁶ *Ibid.*

terutang melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Dengan menggunakan sistem tersebut, masyarakat memiliki peranan penting dalam mencapai target pemasukan pajak.⁷

Pada saat ini kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan mutlak masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Selain karena bertambahnya kebutuhan akan kendaraan pribadi, faktor lain seperti mudahnya memiliki kendaraan bermotor juga menjadikan masyarakat lebih mudah tertarik membeli, apalagi datang dengan berbagai penawaran seperti uang muka dan cicilan pembayaran yang rendah. Namun seiring berjalannya waktu, banyak pengendara motor yang tidak mematuhi kewajiban dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).⁸

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan perpajakan merupakan hal yang penting karena apabila seorang wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya maka bisa saja dia bersalah dan menghindari pembayaran kewajiban perpajakannya.⁹ Maka dari itu, perlunya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk menstabilkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dalam hal ini instansi yang

⁷ Amelia Nur Izza, Linawati, dan Sugeng, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Kediri” dalam <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi>, diakses 9 September 2024

⁸ Tri Ningrum Rizkiana, *Pengaruh Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Intervening (Studi pada Pemilik Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di SAMSAT Ciledug)*, (Jakarta: Skripsi tidak Diterbitkan, 2023), Hlm. 2

⁹ Nur, Ain Husa, Nilawaty Yusuf dan Mulyani Mahmud, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening: Studi Kasus pada SAMSAT Kota Gorontalo” dalam <https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/elmal>, diakses 9 September 2024

menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) melalui Unit Pelayanan Pajak Daerah dengan Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).¹⁰

Sri Mulyani mengemukakan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, baru mencapai 62,3%. Sementara angka tax ratio atau jumlah pembayar pajak Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduk yang seharusnya membayarpajak wajib pajak baru mencapai angka 11%. Rendahnya penerimaan pajak umumnya dikarenakan wajib pajak belum memiliki motivasi yang kuat untuk sadar dan patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan. Sulistiyono dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa isu korupsi, ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dan mekanisme pajak merupakan hal hal yang mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak.¹¹

Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah penting di seluruh dunia baik itu negara maju maupun negara berkembang, karena apabila wajib pajak tidak patuh maka akan memunculkan keinginan untuk melakukan tindakan seperti penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak.¹² Kurangnya

¹⁰ Ulul Laili Rochmawati, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Samsat Kota Semarang II)*, (Semarang: Skripsi tidak Diterbitkan, 2020), Hlm. 2

¹¹ Ahmad Rizky, *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Motivasi Membayar Pajak, Penegakan Hukum dan Religiusitas Terhadap Moral Pajak dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, (Jakarta: Skripsi tidak Diterbitkan, 2020), Hlm. 2

¹² Reine Ajeng Pratiwi dan Heriyanto, “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Soreang” dalam <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal>, diakses 9 September 2024

kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dapat menimbulkan kurang efektifnya pendapatan yang diterima oleh negara, sehingga dapat berdampak tidak hanya pada perekonomian tetapi diberbagai aspek lainnya.¹³

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak sesuai waktu yang tepat, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya.¹⁴ Kepatuhan wajib pajak sangat diharapkan oleh pemerintah agar pembayaran pajak tidak mengalami penundaan dan pembangunan tidak mengalami kendala. Oleh sebab itu wajib pajak sangat dianjurkan untuk patuh terhadap pajak.¹⁵

Saat ini masih ada wajib pajak yang menangguknkan pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka sehingga mengakibatkan pendapatan daerah menjadi tidak optimal. Salah satu penyebabnya yaitu literasi atau pengetahuan yang kurang tentang pajak.¹⁶ Literasi wajib pajak merupakan semua informasi yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan tata cara dan ketentuan perpajakan. Semakin tingginya literasi wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin banyak literasi

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Denny Kurniawan dan Vidyarto Nugroho, “Kepatuhan Wajib Pajak: Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Ketegasan Sanksi Pajak” dalam <https://journal.untar.ac.id/index.php/jpa>, diakses 9 September 2024

¹⁵ *Ibid.*, Hlm 1040

¹⁶ Utami Widya Karlina dan Mukhlizul Hamdi Ethika, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” dalam <https://jkaa.bunghatta.ac.id/index.php/JKAA>, diakses 9 September 2024

perpajakan yang didapat maka wajib pajak akan semakin paham kewajiban perpajakannya dan sanksi yang akan diterima bila melakukan kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan.¹⁷

Sanksi dianggap dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawabnya karena wajib pajak dianggap telah memahami hukum perpajakan.¹⁸ Untuk mengikat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya, juga diperlukan sanksi perpajakan. Dalam pengertiannya sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan diikuti. Dalam peraturan perpajakan dikenal dua macam sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dikenakan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran seperti, sanksi administrasi denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi pidana yang dikenakan adalah hukuman penjara. Sanksi pajak sangat diperlukan agar wajib pajak merasa terbebani dengan denda sehingga merasa rugi jika wajib pajak melanggar peraturan yang berlaku.¹⁹

Tingkat penghasilan menjadi faktor penting untuk menentukan tingkat kepatuhan dalam membayar kewajibannya. Jika wajib pajak berpenghasilan rendah akan memberikan dampak pada ketidakdisiplinan bahkan

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 145

¹⁸ Anita Rizky Widyanti dan Endang Dwi Retnani, "Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan...Hlm. 2

¹⁹ Tri Ningrum Rizkiana, *Pengaruh Sanksi Pajak...*Hlm. 5

keterlambatan dalam melakukan pembayaran pajak. Hal tersebut terjadi sebab wajib pajak akan cenderung mengalokasikan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari demi kelangsungan hidupnya. Sebaliknya, jika penghasilan wajib pajak tinggi, mereka akan mengalokasikan sebagian penghasilan untuk membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor.²⁰

Tingkat pendidikan adalah setiap tahapan pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal yang didapatkan oleh seseorang melalui pendidikan. Dari pendidikan peserta didik dapat menyadari hak dan kewajibannya sebagai masyarakat dan warga negara dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.²¹ Dalam keadaan tertentu, tingkat kesadaran seseorang juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, karena seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya memiliki pola pikir dan tingkah laku yang lebih maju dan berkembang. Semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka akan meningkatkan pemahaman masyarakat untuk menginterpretasikan suatu ketentuan dan peraturan perpajakan dalam suatu negara.²²

²⁰ Jihan Mega Adilin dan Efraim Ferdinan Giri, “Pengaruh Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”, dalam <http://jam.stieykpn.ac.id/index.php/jam/article/view/138>, diakses 28 Oktober 2024

²¹ Ni Kadek Dian Ananda Putri, I Gede Cahyadi Putra, dan Ni Luh Gede Mahayu Dicriyani, “Pengaruh Motivasi, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Denpasar Timur”, dalam <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma>, diakses 9 September 2024

²² Rifa’atul Umah dan Akhmad Riduwan, “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, dalam <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira>, diakses 9 September 2024

Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk Desa Ngadimulyo 2024

RW	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	373	369	742
2	544	537	1081
3	272	274	546
4	272	264	536
5	238	226	464
6	327	335	662
7	440	410	850
8	368	378	746
9	125	124	249
10	396	376	772
Jumlah	3355	3293	6648

Sumber: Data diperoleh langsung dari Desa Ngadimulyo

Tabel 1.2 Data Jenjang Pendidikan Warga Desa Ngadimulyo 2024

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Tidak/Belum Sekolah	1.078
Belum Tamat SD/Sederajat	929
Tamat SD/Sederajat	3.270
SLTP/Sederajat	965
SLTA/Sederajat	341
Diploma I/II	5
Akademi/Diploma III	5
Diploma IV/Strata I	49
Strata II	6
Jumlah	6.648

Sumber: Data diperoleh langsung dari Desa Ngadimulyo

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 di atas, Desa Ngadimulyo memiliki jumlah penduduk yang terbilang padat. Dari jumlah penduduk tersebut pastinya akan sangat mempengaruhi terhadap perpajakan yang ada di desa tersebut. Dapat dilihat tingkatan jenjang pendidikan yang ada menunjukkan bahwa lulusan SD/Sederajat memiliki jumlah terbanyak dari jenjang pendidikan yang lain yaitu sejumlah 3.270. Sedangkan lulusan Diploma I/II dan Diploma III memiliki jumlah paling sedikit dari jenjang Pendidikan yang lain yaitu sejumlah 5.

Kepala UPT PPD Trenggalek, Yudi Kurniawan Akbar pada bulan Juni 2024 mengemukakan, di era digital ini masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke Samsat untuk membayar pajak. UPT PPD Trenggalek bersama-sama mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Trenggalek untuk bisa membayar pajak kendaraan bermotor secara lebih mudah dan membayar pajak kendaraan bermotor tidak harus ke Samsat. UPT PPD Trenggalek sendiri memiliki berbagai layanan unggulan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Di antaranya, Drive Thru Menak Sopal, Sampokja, Samsat Payment Point dan Samsat Keliling Malam.

Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Trenggalek telah memberikan kemudahan pembayaran untuk wajib pajak kendaraan bermotor, termasuk juga pada warga Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak. Maka dari itu kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya akan lebih optimal.

Penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Khulma Apriliani yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Tegal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan dan tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Tegal. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penambahan variabel bebas tingkat pendidikan dan tidak adanya variabel bebas kesadaran pajak dan kualitas pelayanan.²³

Penelitian terdahulu yang serupa juga dilakukan oleh Emilda Resmalinda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sintang. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap

²³ Khulma Apriliani, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Tegal*, (Tegal: Skripsi tidak Diterbitkan, 2021), Hlm. 87

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sintang.²⁴. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak adanya variabel bebas kualitas pelayanan.

Literasi, sanksi, *personal income*, tingkat pendidikan dan kepatuhan merupakan suatu aspek yang saling berkaitan. Dalam menggali literasi dibutuhkan pendidikan untuk mendukung tindakan yang dilakukan. Dengan adanya sanksi dan pendapatan yang maksimal akan mendorong seseorang untuk lebih patuh untuk melakukan suatu kegiatan. Adapun keterkaitan lainnya adalah hubungan sebab akibat. Ketika tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi, maka akan semakin banyak literasi yang diperoleh, sehingga sanksi dan kepatuhan akan lebih diperhatikan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.

Penelitian ini sangat relevan dan penting untuk dilakukan, terutama dalam hal peningkatan kepatuhan pajak yang merupakan sebuah aspek penting dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tersebut seperti literasi pajak, sanksi pajak, *personal income* dan tingkat pendidikan, dengan harapan akan dapat memberikan motivasi untuk meningkatkan partisipasi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya penguatan sistem perpajakan di Indonesia, serta mendukung tercapainya tujuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dan membangun negara

²⁴ Emilda Remalinda, *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sintang*, (Yogyakarta: Skripsi tidak Diterbitkan, 2022), Hlm. 48

melalui kontribusi warga negara yang patuh, terutama pada warga Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.

Hubungan antara variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) terdapat kemungkinan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini variabel pertama yang ada pada variabel independen adalah Literasi Pajak (X1) yang terdapat kemungkinan mempengaruhi variabel dependen Kepatuhan wajib pajak (Y). Variabel independen kedua adalah Sanksi Pajak (X2) yang terdapat kemungkinan mempengaruhi variabel dependen Kepatuhan wajib pajak (Y). Variabel independen ketiga adalah *Personal Income* (X3) yang terdapat kemungkinan mempengaruhi variabel dependen Kepatuhan wajib pajak (Y). Variabel independen keempat adalah Tingkat Pendidikan (X4) yang terdapat kemungkinan mempengaruhi variabel dependen Kepatuhan wajib pajak (Y).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dan dengan mempertimbangkan dengan penelitian – penelitian terdahulu, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Literasi Pajak, Sanksi Pajak, *Personal Income*, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Warga Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek)”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, berikut adalah identifikasi masalah dalam penelitian ini:

- a. Terbatasnya literasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak
- b. Terbatasnya pemahaman masyarakat terkait sanksi pajak apabila telat dalam membayar pajak
- c. Banyaknya masyarakat yang pendidikan terakhirnya sampai jenjang Sekolah Dasar (SD)
- d. Terbatasnya kesadaran masyarakat akan kepatuhan dalam membayar pajak

2. Batasan Penelitian

Untuk menghindari adanya data yang terlalu banyak dan agar penelitian ini lebih fokus terhadap kajian yang diambil, maka dalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan hanya yang berkaitan tentang “Pengaruh Literasi Pajak, Sanksi Pajak, *Personal Income*, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Warga Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek)”. Peneliti juga membatasi responden yaitu Masyarakat yang ada di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian dan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi Pada Warga Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek)?

2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi Pada Warga Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek)?
3. Apakah *personal income* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi Pada Warga Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek)?
4. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi Pada Warga Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek)?
5. Apakah literasi pajak, sanksi pajak, *personal income*, dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi Pada Warga Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek)?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi Pada Warga Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek).
2. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi Pada Warga Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek).

3. Untuk mengetahui apakah *personal income* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi Pada Warga Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek).
4. Untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi Pada Warga Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek).
5. Untuk mengetahui apakah literasi pajak, sanksi pajak, *personal income*, dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi Pada Warga Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek).

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis ataupun praktis, Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan dan memberikan pemahaman apakah literasi pajak, sanksi pajak, *personal income*, dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi/Lembaga

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

b. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan pustaka bagi perguruan tinggi maupun sekolah dengan pembahasan mengenai pajak.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian dengan kajian dan permasalahan yang serupa.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Koresponden berdomisili di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek
2. Literasi pajak, sanksi pajak, *personal income*, dan tingkat pendidikan di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek

G. Penegasan Variabel

1. Penegasan Konseptual

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran, maka peneliti akan menguraikan penjelasan tentang istilah – istilah variabel dalam judul pada penelitian ini:

a. Pengertian Pajak

Berdasarkan UU RI Nomor 28 tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁵

b. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah. Menurut Pasal 1 Nomor 12 dan 13 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.²⁶

c. Pengertian Literasi Pajak

Literasi pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan.²⁷

²⁵ Kementrian Keuangan, *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007* (<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/28tahun2007uu.htm>)

²⁶ Sissy Anastasya, Adiyani Fadjar, dan Wiri Wirastuti, “Mekanisme Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor Bersama Samsat Palu”, dalam <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JRIME>, diakses 9 September 2024

²⁷ Namira Putri Aninda, Nela Safelia, dan Wiwik Tiswiyanti, “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus Di Kantor Konsultan x Kota Jambi”, dalam <https://online-journal.unja.ac.id/mankeu>, diakses 9 September 2024

d. Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan suatu alat sebagai pencegah (preventif) agar seorang wajib pajak tidak melanggar norma akan perpajakan.²⁸

e. Pengertian *Personal Income*

Personal Income adalah jumlah pendapatan yang diterima setiap orang dalam masyarakat termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun.²⁹

f. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan adalah setiap tahapan pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal yang didapatkan oleh seseorang melalui pendidikan.³⁰

g. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Karlina & Ethika (2020), kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk kesediaan pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.³¹

²⁸ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2003), Hlm. 7

²⁹ Nabila Aprilia, dkk, “Pengaruh Pemerintah Terhadap Keseimbangan Pendapatan Nasional Provinsi DKI Jakarta”, dalam <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk>, diakses 28 Oktober 2024

³⁰ Ni Kadek Dian Ananda Putri, I Gede Cahyadi Putra, dan Ni Luh Gede Mahayu Dicriyani, “Pengaruh Motivasi, Tingkat Pendidikan...Hlm. 289

³¹ Delira Aliviany dan Novera Kristianti Maharani, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” dalam <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jebaku>, diakses 9 September 2024

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional adalah definisi dari variabel yang digunakan dalam penelitian secara operasional dalam lingkup objek penelitian.

a. Literasi Pajak

Literasi pajak diartikan sejauh mana wajib pajak memahami dan mengetahui terkait dengan tata cara dan ketentuan perpajakan yang didalamnya termasuk juga jenis pajak yang harus dibayar dan cara perhitungan pajak. Literasi pajak ini dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya .

b. Sanksi Pajak

Sanksi pajak diberlakukan agar wajib pajak merasa terbebani dengan adanya denda sehingga mereka akan berfikir rugi apabila melanggar peraturan yang berlaku.

c. *Personal Income*

Personal Income merupakan penghasilan yang diperoleh seorang wajib pajak dari suatu usaha yang dikerjakan. *Personal income* disini dimaksudkan untuk tingkat pendapatan yang diperoleh wajib pajak itu sendiri.

d. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merujuk pada tahapan pendidikan seseorang baik formal maupun nonformal. Ketika seorang wajib pajak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka mereka akan

memiliki pola pikir yang lebih berkembang sehingga akan meningkatkan pemahaman suatu ketentuan dan peraturan perpajakan.

e. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai tingkat keteraturan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat mengukur sejauh mana seorang wajib pajak mematuhi ketentuan yang berlaku.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori yang berhubungan dengan objek dalam penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel penelitian dan skala pengukuran, teknik

pengumpulan data dan instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian dari hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan secara detail hasil dari setiap hipotesis yang diteliti .

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan saran – saran yang perlu disampaikan.